

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan peraturan berupa norma yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang berlaku untuk semua orang dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, perdamaian, mencegah terjadinya kekacauan dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Indonesia merupakan negara hukum, karenanya aturan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam kehidupan, bukan saja ada aturannya secara formal, namun realisasi pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi penegakan hukum, negara akan menjamin setiap warganya bersamaan kedudukan di depan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat adanya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Selain itu terjadi pola penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan pejabat publik yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung rakyat tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, sampai menghilangkan nyawa.

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum. Sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian-bagian proses atau tahapan yang saling bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum. Penegak hukum sebagai suatu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Para penegak hukum sebagai orang-orang yang dituntut memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tertentu agar usaha penegak hukum itu berhasil. Agar fungsi hukum berjalan dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik.

Penegakan hukum di Indonesia banyak terjadi kesenjangan dan ketidakadilan. Misalnya, melanggar peraturan lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan memunculkan banyak kesenjangan bagi masyarakat Indonesia yang merugikan uang negara ratusan juta, bahkan miliaran rupiah yang dijatuhi hukuman ringan. Contohnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri adalah penegak hukum dengan pangkat dan jabatan tinggi. Selain itu, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara Rp 121 miliar dari proyek senilai Rp 196,8 miliar. Hukuman 10 tahun penjara dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara.

Kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia bukan saja melahirkan ketidakadilan, bahkan dalam konteks Indonesia akan berubah menjadi konflik. Baik konflik antar sesama masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Beberapa kerusuhan yang terjadi belakangan ini mencerminkan hal tersebut, karena itu perlu ketegasan dalam implementasi penegakan hukum. Untuk memunculkan pentingnya kesadaran dalam penegakan hukum di Indonesia, awalnya masyarakat dipaksa, selanjutnya diharapkan memahami dan menyadari pentingnya penegakan hukum pada aturan hukum untuk menciptakan kenyamanan dan keadilan. Penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami masyarakat dari waktu ke waktu. Persoalan kejahatan tiada henti diperdebatkan. Jadi dimana ada kehidupan manusia pasti juga ada kejahatan yang akan selalu mengikutinya. Hal ini berarti bahwa kejahatan terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia.

Menurut Darmadi (2013), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan serta melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk penegakan hukum di Indonesia dipertegas dalam visi, misi, dan tujuannya:

Visi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan sumber nilai, pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna

mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian menjadi manusia Indonesia yang utuh. Misi PPKn ialah membantu mahasiswa memantapkan kepribadian sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, tahu akan hak dan kewajiban, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan moral. Tujuan PPKn di perguruan tinggi adalah berupaya menanamkan sikap kepada mahasiswa sebagai calon intelektual dan penerus cita-cita bangsa (Darmadi, 2013).

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu membantu dan membentuk peserta didik yang handal, berwawasan luas, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, bertanggung jawab, sadar akan pentingnya penegakan hukum, berwibawa, serta pantas menjadi panutan atau tauladan yang baik bagi generasi penerus bangsa.

Pendidikan penegakan hukum merupakan bagian dari materi bab V kelas XI SMA/SMK yang esensinya mengacu pada visi, misi dan tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Materi yang mengacu pada visi dan misi dan tertuang dalam kurikulum tersebut diajarkan oleh guru PPKn ketika mengajarkan mata pelajaran PPKn. Guru sebagai penyampai materi memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menyampaikan materi dengan baik, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan tercapailah tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku . Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Kesenjangan antara Harapan dan Kenyataan tentang Penegakan Hukum di

Indonesia, yang dilakukan dengan Analisis Isi Buku Teks PPKn pada Materi Bab V Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kurikulum 2013 Kelas XI SMA/SMK dan Berita Media Online (*Kompas.com*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana harapan penegakan hukum di Indonesia dalam buku pelajaran PPKn pada materi bab V kurikulum 2013 kelas XI SMA/SMK?
2. Bagaimana kenyataan penegakan hukum di Indonesia dalam berita media online (*kompas.com*)?
3. Bagaimana kesenjangan antara harapan dan kenyataan penegakan hukum di Indonesia dalam buku pelajaran PPKn pada materi bab V kurikulum 2013 kelas XI SMA/SMK dan berita media online (*kompas.com*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk memperjelas saat mengumpulkan data, dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan harapan penegakan hukum di Indonesia dalam buku pelajaran PPKn pada materi bab V kurikulum 2013 kelas XI SMA/SMK.
2. Untuk menggambarkan kenyataan penegakan hukum di Indonesia dalam berita media online (*kompas.com*).

3. Untuk menggambarkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan penegakan hukum di Indonesia dalam buku pelajaran PPKn pada materi bab V kurikulum 2013 kelas XI SMA/SMK dan berita media online (*kompas.com*)?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan penegakan hukum di Indonesia dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya mata pelajaran PPKn.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan penegakan hukum di Indonesia.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang terkait dan relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi motivasi dalam menegakan hukum dan bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam kelebihan dan kekurangan buku yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Sebagai referensi dalam membiasakan menegakkan hukum di Indonesia.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan. “kesenjangan berarti perihal (yang bersifat, berciri) senjang, ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan (KBBI, 2014:1274). Jadi, kesenjangan adalah suatu keadaan ketidak seimbangan yang ada di masyarakat dan menjadikan suatu perbedaan.
2. Harapan. “Harapan adalah sesuatu yang (dapat) diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, dan orang yang diharapkan atau dipercaya (KBBI, 2014:482). Jadi, harapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan.
3. Kenyataan. “Kenyataan berarti terang (kelihatan, kedengaran, dsb), jelas sekali, benar-benar ada, ada buktinya (KBBI, 2014:972). Jadi, kenyataan adalah Hal yang nyata, hal yang benar-benar ada/terjadi.
4. Penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Analisis isi. Menurut Eriyanto (2013:10), analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks).